



UNIVERSITAS TERBUKA

BAGIAN ANGGARAN 023
*Kementerian Pendidikan, Kebudayaan
Riset, dan Teknologi*



LAPORAN KEUANGAN
DITJEN DIKTIRISTEK
(PTN BH – UNIVERSITAS TERBUKA)
DITJEN Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan
Riset, Dan Teknologi
PERIODE 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2024
(AUDITED)

*Jalan Cabe Raya, Pamulang
Tangerang Selatan 15437*

BAGIAN ANGGARAN 023
*Kementerian Pendidikan, Kebudayaan
Riset, Dan Teknologi*



LAPORAN KEUANGAN
DITJEN DIKTIRISTEK
(PTN BH – UNIVERSITAS TERBUKA)
DITJEN Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
PERIODE 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2024

(AUDITED)

*Jalan Cabe Raya, Pamulang
Tangerang Selatan 15437*

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

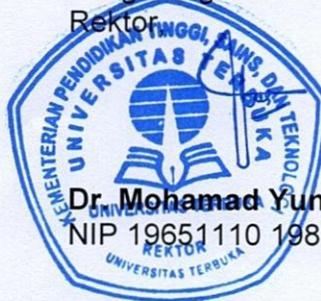
Ditjen Diktiristek (PTN BH – Universitas Terbuka) dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Diktiristek (PTN BH – Universitas Terbuka) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Universitas Terbuka. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tangerang Selatan, 5 Mei 2025

Rektor



Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A.

NIP 19651110 198903 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Euitas	30
E. Pengungkapan Penting Lainnya	34
F. Capaian Rincian Output	35
VI. Lampiran	36

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
DITJEN DIKTIRISTEK (PTNBH - UNIVERSITAS TERBUKA)**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Audited Ditjen Diktiristek (PTNBH - Universitas Terbuka) untuk tahun anggaran 2024 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Universitas Terbuka.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Tangerang Selatan, 2 Mei 2025

Kepala Kantor Pengawas Internal

The image shows a blue circular official stamp of Universitas Terbuka. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INOVASI' around the top edge, 'UNIVERSITAS TERBUKA' in the center, and 'UNIVERSITAS TERBUKA' at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Dr. Hendrian, S.E., M.Si.

NIP 19690129 200003 1 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: 021-7490941 (Hunting)
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)
Laman: www.ut.ac.id

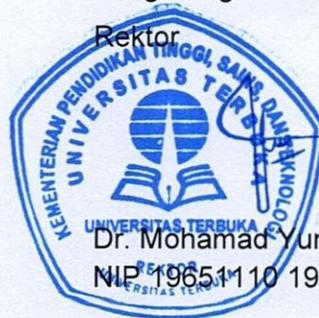
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Ditjen Diktiristek (PTNBH - Universitas Terbuka) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tangerang Selatan, 5 Mei 2025

Rektor



Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A.
NIP. 19651110 198903 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan DITJEN DIKTIRISTEK (PTN BH – Universitas Terbuka) Tahun 2024 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp233.015.241 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp0. Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp127.897.438.498 atau mencapai 98,25 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp130.177.218.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 berupa Aset Lancar. Dan Nilai Kewajiban sebesar Rp0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp127.897.438.498 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp(127.897.438.498).

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp233.015.241 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(127.664.423.257).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp0 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(127.664.423.257), kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp127.664.423.257 sehingga Kenaikan Ekuitas sebesar Rp0. Ekuitas akhir entitas pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNIVERSITAS TERBUKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024		% thd Anggaran	2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	-	233,015,241	0	101,022,182
Jumlah Pendapatan		-	233,015,241	0	101,022,182
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	130,177,218,000	127,897,438,498	98.25	110,212,929,308
Belanja Barang	B.4.	-	-	0	-
Belanja Modal	B.5.	-	-	0	-
Jumlah Belanja		130,177,218,000	127,897,438,498	98.25	110,212,929,308

III. NERACA

UNIVERSITAS TERBUKA
NERACA
PER 30 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET		-	-
KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS		-	-



III. LAPORAN OPERASIONAL

UNIVERSITAS TERBUKA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	C.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak		-	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	C.2	127,897,438,498	110,212,929,308
Beban Persediaan	C.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	C.4	-	-
Beban Pemeliharaan	C.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	C.6	-	-
Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat	C.7	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	C.8	-	31,954,352,595
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	C.9	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		127,897,438,498	142,167,281,903
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(127,897,438,498)	(142,167,281,903)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	C.10		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	(1,180,332,924,849)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		233,015,241	101,022,182
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		233,015,241	(1,180,231,902,667)
POS LUAR BIASA	C.11		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	C.12	(127,664,423,257)	(1,322,399,184,570)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNIVERSITAS TERBUKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Ekuitas Awal	D.1	-	-
Surplus/Defisit LO	D.2	(127,664,423,257)	(1,322,399,184,570)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	D.3	-	(2,339,640,427,797)
Lain-lain	D.3.1	-	(2,339,640,427,797)
Transaksi Antar Entitas	D.4	127,664,423,257	3,662,039,612,367
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		-	-
Ekuitas Akhir	D.5	-	-

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka adalah Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1984, ditetapkan menjadi instansi pemerintah yang menerapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 Tanggal 20 Oktober 2022.

RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS TERBUKA

Visi Universitas Terbuka adalah menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia.

Misi Universitas Terbuka adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan dan berkualitas dunia; dan
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan penyelenggaraan Universitas Terbuka adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompetensi, dan mampu bersaing secara global
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pemecahan masalah global; dan
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan merespon masalah global.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Universitas Terbuka. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara untuk melakukan manajemen pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan dari perencanaan sampai pertanggungjawaban.

SAKTI terdiri dari Modul Administrator, Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang dan Modul GL Pelaporan (GLP). SAKTI Modul GL Pelaporan (GLP) dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Universitas Terbuka menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Universitas Terbuka dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
akuntansi

A5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang merupakan entitas pelaporan dari Universitas Terbuka. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Universitas Terbuka adalah sebagai berikut.

Pendapatan - LRA

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada mahasiswa/masyarakat.
 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya diakui setelah sewa gedung/ruangan dan fasilitas lainnya diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa serta dana lainnya diterima pada rekening operasional BLU.
 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU diakui setelah bunga bank dan bunga deposito dihitung berdasarkan jatuh tempo.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- Harga pembelian (FIFO) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang

sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

*Penyusutan Aset
Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Universitas Terbuka telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan pagu dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	130,177,218,000	130,177,218,000
Belanja Barang	-	-
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	130,177,218,000	130,177,218,000

DIPA terakhir Universitas Terbuka Tahun 2024 adalah DIPA Revisi 4 Nomor: SP DIPA-023.17.2.690646/2024 tanggal 10 Oktober 2024, adapun perubahan tersebut disebabkan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada hal III DIPA.

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp233.015.241. Pendapatan Universitas Terbuka merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya merupakan pendapatan atas pengembalian Belanja pegawai dan Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS tahun anggaran yang lalu yang berasal dari Rupiah Murni (RM) dan disetorkan ke kas negara. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagai berikut.

Realisasi
Pendapatan
Rp233.015.241



*Perbandingan Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2024*

Uraian	TA 2024		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya:			
1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp -	Rp 229.014.693	-
2. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	Rp -	Rp 4.000.548	-
Jumlah	Rp -	Rp 233.015.241	-

Realisasi Pendapatan Periode TA 2024 sebesar Rp233.015.241 sedangkan TA 2023 sebesar Rp101.022.182. Secara lengkap rincian pendapatan terlihat pada tabel berikut.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBP Lainnya :			
1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp 229.014.693	Rp 71.665.182	219,56
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	Rp -	Rp 29.357.000	(100,00)
3. Pendapatan Setoran dari Sisa Uang Non TP/TGR Pensiunan PNS	Rp 4.000.548	Rp -	-
JUMLAH	Rp 233.015.241	Rp 101.022.182	130,66

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 130,66 persen. Adapun kenaikan pendapatan tersebut disebabkan karena adanya penerimaan Kembali belanja pegawai TAYL atas pengembalian Uang Makan PNS bulan Desember Tahun 2023.

**B.2. Belanja**

Realisasi Belanja
Negara
Rp127.897.438.498

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp127.897.438.498 atau 98,25 persen dari anggaran belanja sebesar Rp130.177.218.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut.

*Perbandingan Estimasi dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2024*

Uraian	TA 2024		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	Rp 130.177.218.000	Rp 127.926.744.573	98,27
Belanja Barang	Rp -	Rp -	-
Belanja Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	-
Belanja Modal	Rp -	Rp -	-
Total Belanja kotor	Rp 130.177.218.000	Rp 127.926.744.573	98,27
Pengembalian		Rp (29.306.075)	-
Jumlah	Rp 130.177.218.000	Rp 127.897.438.498	98,25

Realisasi Belanja TA 2024 sebesar Rp127.897.438.498 sedangkan TA 2023 sebesar Rp110.212.929.308 atau mengalami kenaikan sebesar 16,05 persen. Rincian belanja terlihat pada tabel berikut.

*Perbandingan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	Rp 127.897.438.498	Rp 110.212.929.308	16,05
Belanja Barang	Rp -	Rp -	-
Belanja Modal	Rp -	Rp -	-
JUMLAH	Rp 127.897.438.498	Rp 110.212.929.308	16,05

Kenaikan Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 disebabkan antara lain:

1. Penambahan dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru Tahun 2024 sebanyak 114 orang
2. Penambahan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 17 orang
3. Penambahan karna perpindahan pegawai Negeri Sipil (PNS) dari satker lain sebanyak 8 orang, dan
4. Adanya perubahan pembayaran Serdos Non PNS dari dana PTNBH ke Dana Rupiah Murni sebanyak 7 orang.

**B.3. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai
Rp127.897.438.498

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Alokasi DIPA belanja pada Tahun 2024 hanya belanja pegawai, sedangkan untuk belanja barang dan belanja modal menggunakan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PTNBH-UT Tahun 2024.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp127.897.438.498 dan Rp110.212.929.308. Adapun belanja pegawai pada TA 2024 terdiri dari belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Pendidik Non PNS. Rincian belanja terlihat pada tabel berikut.

*Rincian Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 126.020.945.770	Rp 110.100.892.847	14,46
Belanja Lembur	Rp -	Rp 159.131.000	(100,0)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	Rp 673.806.100	Rp -	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	Rp 1.231.992.703	Rp -	0,00
Jumlah Belanja Kotor	Rp 127.926.744.573	Rp 110.260.023.847	16,02
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp (29.306.075)	Rp (47.094.539)	(37,8)
JUMLAH	Rp 127.897.438.498	Rp 110.212.929.308	16,05

B.4. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp0

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. UT ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 sehingga tidak ada alokasi belanja barang pada Satker Ditjen Diktiristek (PTNBH - Universitas Terbuka) (690646). Alokasi DIPA belanja pada Tahun 2024 hanya belanja pegawai, sedangkan untuk belanja barang menggunakan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PTNBH-UT Tahun 2024.

**B.5 Belanja Modal***Belanja Modal Rp0*

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Alokasi DIPA belanja PTNBH-UT pada Tahun 2024 hanya belanja pegawai, sedangkan untuk belanja barang dan belanja modal menggunakan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PTNBH-UT Tahun 2024.

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Perbandingan PNBP antara Laporan Operasioanal (LO) dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

PNBP	JUMLAH
PNBP di LRA (a)	Rp 233,015,241
PNBP Operasional di LO (b)	
- Pendapatan Operasional	Rp -
- PNBP Non Operasional di LO (b)	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Rp -
Pendapatan Kegiatan Non Operasional lainnya	Rp 233,015,241
Jumlah (b)	Rp 233,015,241
Jumlah (c) = (a) - (b)	Rp -

Tidak ada selisih antara laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 dengan Laporan Operasional per 31 Desember 2024.

C.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP
Rp0

Jumlah pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir periode TA 2024 dan TA 2023 sebesar Rp0 dan Rp0. Pada TA 2024 pendapatan sebesar Rp0, hal ini disebabkan karena UT ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 sehingga tidak ada pendapatan pada Satker Ditjen Diktiristek (PTNBH - Universitas Terbuka) (BA.023.17.690646).

C.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp127.897.438.4998

Jumlah Beban Pegawai untuk periode TA 2024 dan TA 2023 sebesar Rp127.897.438.498 dan Rp110.212.929.308. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut.



*Rincian Beban Pegawai
Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023*

Uraian	TA 2024	TA 2023	%NAIK (TURUN)
Beban Gaji PNS	Rp 70.213.852.465	Rp 58.366.299.579	20,30
Beban Tunjangan-Tunjangan PNS	Rp 55.778.083.230	Rp 51.687.498.729	7,91
Beban Gaji PPPK	Rp 828.564.771	Rp -	-
Beban Tunjangan-Tunjangan PPPK	Rp 1.076.938.032	Rp -	-
Beban Lembur	Rp -	Rp 159.131.000	(100)
Jumlah	Rp 127.897.438.498	Rp 110.212.929.308	16,05

Kenaikan Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 disebabkan antara lain:

1. Penambahan dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru Tahun 2024 sebanyak 114 orang
2. Penambahan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 17 orang
3. Penambahan karna perpindahan pegawai Negeri Sipil (PNS) dari satker lain sebanyak 8 orang, dan
4. Adanya perubahan pembayaran Serdos Non PNS dari dana PTNBH ke Dana Rupiah Murni sebanyak 7 orang.



Perbandingan beban pegawai antara Laporan Operasional (LO) dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Uraian Jenis Beban	LO	LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan PNS			
Beban Gaji Pokok PNS	Rp 70.212.967.260	Rp 70.212.967.260	Rp -
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 885.205	Rp 885.205	Rp -
Beban Tunj. Suami/istri PNS	Rp 5.128.339.524	Rp 5.128.339.524	Rp -
Beban Tunj. Anak PNS	Rp 1.352.640.696	Rp 1.352.640.696	Rp -
Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp 7.281.658.000	Rp 7.281.658.000	Rp -
Beban Tunj. PPh PNS	Rp 920.576.231	Rp 920.576.231	Rp -
Beban Tunj. Beras PNS	Rp 3.381.217.380	Rp 3.381.217.380	Rp -
Beban Uang Makan PNS	Rp 9.099.830.000	Rp 9.099.830.000	Rp -
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	Rp 75.700.000	Rp 75.700.000	Rp -
Beban Tunjangan Umum PNS	Rp 1.368.580.000	Rp 1.368.580.000	Rp -
Beban Tunjangan Profesi Dosen	Rp 24.141.360.399	Rp 24.141.360.399	Rp -
Beban Tunjangan kehormatan Profesor	Rp 3.028.181.000	Rp 3.028.181.000	Rp -
Jumlah	Rp 125.991.935.695	Rp 125.991.935.695	Rp -
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK			
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	Rp 673.806.100	Rp 673.806.100	Rp -
Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp 828.550.000	Rp 828.550.000	Rp -
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp 14.771	Rp 14.771	Rp -
Belanja Tunjangan Suami/istri PPPK	Rp 42.194.260	Rp 42.194.260	Rp -
Belanja Tunjangan Anak PPPK	Rp 15.975.832	Rp 15.975.832	Rp -
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp 172.780.000	Rp 172.780.000	Rp -
Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp 39.975.840	Rp 39.975.840	Rp -
Belanja Uang Makan PPPK	Rp 132.206.000	Rp 132.206.000	Rp -
Jumlah	Rp 1.905.502.803	Rp 1.905.502.803	Rp -
Jumlah Beban Pegawai	Rp 127.897.438.498	Rp 127.897.438.498	Rp -

C.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp0

Jumlah Beban Persediaan periode TA 2024 dan TA 2023 sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang - barang yang habis pakai, termasuk barang - barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan TA 2024 sebesar Rp0 karena UT telah ditetapkan sebagai satker PTNBH sehingga UT tidak melakukan pencatatan pemakaian pada aplikasi SAKTI modul persediaan.



C.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa Rp0*

Perolehan Beban barang dan jasa periode TA 2024 dan TA 2023 sebesar Rp0 dan Rp0. Beban barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban barang dan jasa TA 2024 sebesar Rp0, karena UT telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) sehingga beban barang dan jasa pada Satker Ditjen Diktiristek (PTNBH - Universitas Terbuka) (690646) menggunakan anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PTNBH-UT Tahun 2024.

C.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan
Rp0*

Beban pemeliharaan periode TA 2024 dan TA 2023 sebesar Rp0 dan Rp0. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan TA 2024 sebesar Rp0, karena UT telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) sehingga beban pemeliharaan pada Satker Ditjen Diktiristek (PTNBH - Universitas Terbuka) (690646) menggunakan anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PTNBH-UT Tahun 2024.

C.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas Rp0*

Beban Perjalanan Dinas periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban perjalanan dinas TA 2024 sebesar Rp0, karena UT telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) sehingga beban perjalanan dinas pada Satker Ditjen Diktiristek (PTNBH - Universitas Terbuka) (690646) menggunakan anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PTNBH-UT Tahun 2024.



Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat Rp0

C.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban tersebut adalah barang persediaan berupa bahan ajar yang telah diserahkan kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat periode TA 2024 sebesar Rp0 karena UT telah ditetapkan sebagai satker PTNBH sehingga UT tidak melakukan pencatatan pemakaian pada aplikasi SAKTI modul persediaan.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp0

C.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan TA 2023 sebesar Rp0 dan Rp31.954.352.595. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	TA 2024	TA 2023	%NAIK (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 21.597.167.734	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp 8.829.766.749	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Rp -	Rp 85.918.970	(100,00)
Beban Penyusutan Irigasi	Rp -	Rp 497.491.127	(100,00)
Beban Penyusutan Jaringan	Rp -	Rp 500.488.481	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp 7.666.666	(100,00)
Jumlah Penyusutan	Rp -	Rp 31.518.499.727	(100,00)
Beban Amortisasi Software	Rp -	Rp 382.558.354	(100,00)
Beban Amortisasi Lisensi	Rp -	Rp 29.133.822	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Rp -	Rp 24.160.692	(100,00)
Jumlah Amortisasi	Rp -	Rp 435.852.868	(100,00)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp -	Rp 31.954.352.595	(100,00)



Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 sebesar Rp0, karena UT ditetapkan sebagai satker PTNBH sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 sehingga tidak ada beban Penyusutan dan Amortisasi pada Satker Ditjen Diktiristek (PTNBH – Universitas Terbuka) (690646).

C.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah beban penyisihan piutang tak tertagih periode TA 2024 dan TA 2023 sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyisihan Piutang tak tertagih periode 31 Desember 2024 sebesar Rp0 karena UT ditetapkan sebagai satker PTNBH sehingga penyesuaian atas saldo piutang bukan pajak dilakukan pada laporan keuangan PTNBH.

C.10. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp233.015.241

Pos Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional periode TA 2024 dan TA 2023 sebesar Rp233.015.241 dan Rp(1.180.231.902.667). Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut.

Rincian Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2024 dan TA 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	%NAIK (TURUN)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	Rp -	Rp (1.180.332.924.849)	(100,00)
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya	Rp 233.015.241	Rp 101.022.182	130,66
Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya	Rp -	Rp -	-
Jumlah Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp 233.015.241	Rp (1.180.231.902.667)	(100,02)



Perbandingan Kegiatan Non Operasional antara Laporan Operasional (LO) dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Uraian Jenis Beban	LO	LRA	Selisih
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar :			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan mesin	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp -	Rp -	Rp -
Beban Pelepasan Aset Non Lancar :			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan kegiatan Non Operasional Lainnya:			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp 229,014,693	Rp 229,014,693	Rp -
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	Rp 4,000,548	Rp 4,000,548	Rp -
Jumlah	Rp 233,015,241	Rp 233,015,241	Rp -
Beban kegiatan Non Operasional Lainnya:			
Beban Persediaan Rusak/Usang	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 233,015,241	Rp 233,015,241	Rp -

C.11 Pos-pos Luar Biasa

Pos-pos luar biasa
Rp0

Pos Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

C.12. Surplus/Defisit Laporan Operasional

Defisit Laporan
Operasional
Rp(127.664.423.257)

Surplus/Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp(127.664.423.257) dan Rp(1.322.399.184.570).

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****D.1. Ekuitas Awal***Ekuitas Awal Rp0*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 sebesar Rp0 dan Rp0.

D.2. Surplus (Defisit) LO

*Surplus (Defisit) LO
Rp(127.664.423.257)
7)*

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(127.664.423.257) dan Rp(1.322.399.184.570). Surplus/defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

D.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**D.3.1 Lain-lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp(2.339.640.427.797). Koreksi lain lain sebesar Rp(2.339.640.427.797) merupakan jurnal penyesuaian atas Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dan Kewajiban dari Kemendikbudristek kepada PTNBH (PNKA PTNBH 2023 - UT) Nomor:45054/A.A2/KU.03.02/2023 dan Nomor:B/81/UN31.PPKU/PL.13/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1	Kas dan Setara kas	(831.340.512.524)
2	Investasi Jangka Pendek	(1.559.000.000.000)
3	Belanja Dibayar Dimuka	(1.172.573.860)
4	Piutang	(12.934.179.142)
5	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	3.720.621.129
6	Utang Usaha	46.146.360.293
7	Pendapatan Di terima Dimuka	13.608.266.497
8	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	1.331.589.810
	Jumlah	(2.339.640.427.797)



Transaksi antar
Entitas
Rp127.664.423.257

D.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp127.664.423.257 dan Rp3.622.039.612.367. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Diterima dari Entitas Lain	Rp (233,015,241)	Rp (101,022,182)
Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp 127,897,438,498	Rp 110,212,929,308
Transfer Masuk Kas BLU Dari BLU Lain	Rp -	Rp 2,342,552,346,684
Transfer Masuk	Rp -	Rp 1,209,375,358,557
Transfer Keluar	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 127,664,423,257	Rp 3,662,039,612,367

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

D.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan Penyetoran PNBPNP ke Kas Negara antara lain pendapatan dari pemindah tanganan BMN, Pendapatan Denda dan Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).

Pada periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, Diterima dari Entitas Lain (DDEL) sebesar Rp(233.015.241) dan Rp(101.022.182). Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan belanja yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni (RM). Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp127.897.438.498 dan Rp110.212.929.308.

**D .4 .2 Transfer Masuk/ Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp0. Dan Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp3.551.927.705.241. Transaksi Transfer Masuk sebesar Rp3.551.927.705.241 merupakan Transfer Masuk dari Universitas Terbuka (BA.023.17.677531) sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) pelaksanaan likuidasi Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor:B/297/UN31.BKUK1 /KU.03.03/2023 dan Nomor:43/EI/KU/2023 Tanggal 26 April 2023 kepada Satker Ditjen Diktiristek (PTNBH - Universitas Terbuka) (BA.023.17. 690646) dengan rincian sebagai berikut.



No	Uraian	Jumlah
A	Transfer Masuk Kas BLU Dari BLU Lain	
1	Kas dan Bank - BLU	Rp (783.552.346.684)
2	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	Rp (1.559.000.000.000)
	Jumlah	Rp (2.342.552.346.684)
B	Transfer Masuk	
1	Kas Lainnya di BLU	Rp (47.788.165.840)
2	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	Rp (1.172.573.860)
3	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	Rp (10.857.184.339)
4	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	Rp (2.076.994.803)
5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	Rp 3.657.674.206
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	Rp 62.946.923
7	Barang Konsumsi	Rp (21.995.798.222)
8	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp (75.391.420)
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Rp (121.625.644.107)
10	Persediaan Lainnya	Rp (195.277.681)
11	Peralatan dan Mesin	Rp (662.075.986.480)
12	Gedung dan Bangunan	Rp (767.343.924.665)
13	Jalan dan Jembatan	Rp (2.732.980.000)
14	Irigasi	Rp (37.001.017.950)
15	Jaringan	Rp (29.645.160.219)
16	Aset Tetap Renovasi	Rp (2.100.778.003)
17	Aset Tetap Lainnya	Rp (8.105.959.942)
18	Konstruksi Dalam pengerjaan	Rp (192.096.039.776)
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 535.683.928.080
20	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 80.424.585.624
21	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	Rp 1.171.653.871
22	Akumulasi Penyusutan Irigasi	Rp 3.982.991.733
23	Akumulasi Penyusutan Jaringan	Rp 15.439.883.519
24	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp 946.265.014
25	Software	Rp (10.359.415.021)
26	Lisensi	Rp (782.601.441)
27	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp (475.000.000)
28	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp (5.742.464.911)
29	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp 2.732.885.909
30	Akumulasi Amortisasi Software	Rp 9.096.447.924
31	Akumulasi Amortisasi Lisensi	Rp 587.520.720
32	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp 1.331.589.810
33	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp 46.146.360.293
34	Pendapatan Diterima di Muka BLU	Rp 13.608.266.497
	Jumlah	Rp (1.209.375.358.557)
	Total	Rp (3.551.927.705.241)

**D.5. Ekuitas Akhir***Ekuitas Akhir Rp0*

Nilai Ekuitas akhir periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**E.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA****E.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

1. Dana bantuan Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri dan Program Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi Tahun 2024 sebesar Rp17.045.247.000 melalui rekening Bendahara Pengeluaran pada tanggal 5 Februari 2024.
2. Dana bantuan Penyelenggaraan Ajang Talenta Jenjang Pendidikan Tinggi T.A 2024 di bidang seni budaya dan literasi *National University Debating Championship* (NUDC) sebesar Rp724.864.000 melalui rekening Bendahara Pengeluaran pada tanggal 20 Mei 2024.
3. Dana bantuan program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Termin I sebesar Rp32.760.000 melalui rekening Bendahara Pengeluaran pada tanggal 20 Mei 2024.
4. Dana bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Termin I sebesar Rp110.904.000 melalui rekening Bendahara Pengeluaran pada tanggal 21 Mei 2024.
5. Dana Penelitian termin I kerjasama antara UT (unit LPPM) dengan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp2.191.208.000 melalui rekening Bendahara Pengeluaran pada tanggal 5 Juli 2021.
6. Insentif Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) sebesar Rp2.375.000 melalui rekening Bendahara Pengeluaran pada tanggal 9 Agustus 2024.
7. Dana IKU Universitas Terbuka tahun 2024 sebesar Rp3.751.000.000 melalui rekening Bendahara Pengeluaran tanggal 27 Agustus 2024.
8. Dana bantuan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Termin II sebesar

- Rp3.640.000 melalui rekening Bendahara Pengeluaran tanggal 7 Oktober 2024.
9. Dana bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Termin II melalui rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp27.726.000 tanggal 8 Oktober 2024.
 10. Dana bantuan Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri dan Program Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi Tahun 2024 Termin II sebesar Rp2.130.656.000 melalui rekening Bendahara Pengeluaran tanggal 22 Oktober 2024.
 11. Dana Penelitian termin II kerjasama antara UT (unit LPPM) dengan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp547.802.000 melalui rekening Bendahara Pengeluaran pada tanggal 30 Oktober 2024.

F. CAPAIAN RINCIAN OUTPUT

LAPORAN REALISASI KINERJA Tahun Anggaran 2024									
Periode s.d bulan		: 2024-09							
Kementerian Negara/Lembaga		: 023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI							
Eselon 1		: 023.17 - DITJEN PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI							
Wilayah/Provinsi		: 29.04 - KAB. TANGERANG/BANTEN							
Satuan Kerja		: 690646 - DITJEN DIKTRISTEK (PTN BH - UNIVERSITAS TERBUKA)							
Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Satuan	Progres Capaian	
023.17.WA	Program Dukungan Manajemen								
994	Layanan Perkantoran	130,177,218,000	127,926,744,573	98.27%	1	1	Layanan	100%	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
	Subtotal	130,177,218,000	127,926,744,573	98.27%	1	1	Layanan	100%	
	Penyesuaian (Revisi Dipa/ Pengembalian Belanja/ dll.)	0	3,399,224						
		130,177,218,000	127,923,345,349	98.27%	1	1	Layanan	100%	

Pengembalian belanja pada TA 2024 merupakan pengembalian belanja melalui SPM langsung maupun dengan penyetoran SSPB ke kas negara, dengan rincian:

1. Pengembalian belanja pegawai melalui potongan SPM sebesar Rp3.399.224.
2. Realisasi capaian output sebesar 1 layanan telah diisikan pada awal periode pelaporan capaian output yaitu pada Bulan Januari 2024.